

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan calon kepala daerah yang bisa berasal dari partai politik maupun individu yang independen. Proses pengangkatan pejabat publik, baik melalui pemilihan langsung oleh masyarakat atau penunjukan, menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi representatif.

Selama ini, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, dan peningkatan partisipasi publik dalam urusan negara tercermin dalam perubahan mekanisme yang lebih transparan dan inklusif bagi semua warga negara. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).¹ Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih calon kepala daerah, baik yang berasal dari partai politik maupun calon independen. Ini merupakan bagian dari rekrutmen pejabat publik, baik melalui pemilihan langsung oleh masyarakat maupun dengan penunjukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi keterwakilan.

¹ Muslimin (Skripsi), *Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang)*. Makassar, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

1

Dalam menghadapi pemilu seperti pemilihan kepala daerah banyak faktor yang harus menjadi fokus calon kepala daerah ini, diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya.²

Syarat pencalonan yang ketat juga menjadi faktor yang berpengaruh. Calon perseorangan harus memenuhi persyaratan dukungan minimal sebanyak 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayahnya, sementara partai politik harus memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ini mendorong partai politik untuk membentuk koalisi untuk memenuhi syarat tersebut.

Tidak kalah pentingnya, ongkos politik yang tinggi juga menjadi faktor penting dalam penentuan keputusan untuk mencalonkan diri. Calon harus mempersiapkan dana yang besar untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Semua faktor ini dapat menjadi penyebab munculnya calon tunggal dalam

² Roy Natsir (Skripsi), "*Kekuatan Politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013*", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

pilkada.³ Fenomena calon tunggal ini salah satunya terjadi pada Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Utara. Fenomena ini terjadi di tiga wilayah, yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan, fenomena ini lebih menonjol karena pasangan calon tunggal, Dosmar Banjarnahor dan Oloan Panieran Nababan diusung oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat, yaitu sebanyak 25 kursi. Partai-partai tersebut antara lain PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai Demokrat, dan Partai PSI (beritasatu.com).⁴

³ Tirto Id, "Pilkada Calon Tunggal: Kegagalan Partai dan Pemborosan Anggaran", artikel ini diakses dari <https://tirto.id/pilkada-calon-tunggal-kegagalan-partai-danpemborosan-anggaran-cDfM> pada 25 September 2023 pukul 20.23.

⁴ Kevin Natanael Marbun, Jonah Silas dan Tedy Nurzaman, (*Gerakan Koko (Kotak Kosong): Studi Kasus Pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020*), Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, (Indonesian Journal of Social and Political Sciences Volume 3, No.2, Oktober 2022).

Tabel 1.1
komposisi anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi Dala Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	2	0
GERINDRA	5	2
PDI-P	3	7
Golkar	6	5
NasDem	3	3
Perindo		(Baru) 2
PSI		(Baru) 1
PAN	1	0
Hanura	3	4
Demokrat	2	1
Jumlah Anggotam/l	25	25
Jumlah Partai	8	8

Sumber: Wikipedia

Melihat situasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat beberapa kejadian yang mencirikan sebagai "borong partai". Hal ini bisa dilihat melalui pernyataan seorang bakal calon bupati dalam sebuah wawancara. Dia menyebutkan bahwa awalnya ada tiga partai yang mendukung pasangan calon bupati-wakil calon bupati, yakni Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai NasDem. Namun, seiring dengan perubahan dinamika politik, satu per satu partai tersebut menarik dukungan mereka dari calon tersebut dan beralih untuk mendukung petahana. Akhirnya, seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan dukungan mereka terhadap petahana.

Tabel 1.2
Perolehan Suara Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan.

NO	Kecamatan	Bupati dan Wakil Bupati	Kotak Kosong
1.	Pollung	7.896 suara (75,1%)	2.622 suara (24,9%)
2.	Parlilitan	4.259 suara (42,1%)	5.853 suara (57,9%)
3.	Baktiraja	2.125 suara (53,9%)	1.819 suara (46,1%)
4.	Paranginan	4.087 suara (56,3%)	3.174 suara (43,7%)
5.	Lintong Nihuta	9.128 suara (54,8%)	7.517 suara (45,2%)
6.	Dolok Sanggul	12.469 suara (49,2%)	12.881 suara (50,8%)
7.	Sijamapolang	1.755 suara (53,9%)	1.502 suara (46,1%)
8.	Onan Ganjang	3.366 suara (59,7%)	2.272 suara (40,3%)
9.	Pakkat	4.783 suara (39,5%)	7.335 suara (60,5%)
10.	Tarabintang	1.993 suara (50,4%)	1.965 suara (49,6%)
Total		51.861 suara (52,5%)	46.960 suara (47,5%)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa pasangan Dosmar–Oloan mengungguli 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sementara 3 kecamatan lainnya diungguli oleh kotak kosong.

Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menciptakan situasi di mana warga sebenarnya tidak memiliki pilihan selain untuk mendukung atau menolak calon yang ada. Pertanyaan muncul tentang apa yang memengaruhi kekuatan calon tunggal, dan apakah faktor-faktor tertentu, seperti popularitas, dukungan politik, atau kondisi sosial ekonomi, berperan dalam menciptakan situasi ini.

Selain itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat merespons pemilihan calon tunggal, apakah mereka merasa bahwa pemilihan tersebut masih demokratis, dan apakah ada kekhawatiran tentang representasi dan akuntabilitas dalam sistem ini.

Pada dasarnya, konsep demokrasi sangat terkait erat dengan konsep pemilu yang akan dibahas. Demokrasi, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mengandung makna bahwa kekuasaan negara terletak di tangan rakyat dan setiap tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan konsep ini, pemilu dianggap sebagai cara untuk menegaskan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilu adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berbasis pada demokrasi perwakilan. A. Sudiharto Djiwandono berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang penting, yang mencerminkan partisipasi nyata rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁵ Setiap pemerintahan yang mengklaim dirinya demokratis harus dapat menyelenggarakan pemilu secara demokratis, karena pemilu yang demokratis adalah pilar penting dalam sistem demokrasi modern.

Pengaruh politik yang diselenggarakan oleh Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan dalam upaya memenangkan kepercayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat dukungan dan antusiasme masyarakat, serta dukungan dari partai politik. Kepercayaan masyarakat dan afiliasi partai politik terhadap pasangan ini tentu saja berkorelasi erat dengan rekam jejak Dosmar Banjarnahor sebagai petahana yang telah menjalankan jabatan Bupati selama satu periode

⁵ A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, dimuat dalam *ANALISA*, No.3, Maret 1983, CSIS Jakarta, hlm.201.

sebelumnya. Jika dilihat dari sisi popularitas, sosok Dosmar Banjarnahor telah menjadi akrab di kalangan warga Humbang Hasundutan setelah berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 bersama dengan wakilnya, Saut Parlindungan Simamora. Pada saat itu, mereka berhasil mengalahkan Marganti Manullang, yang telah menjabat sebagai Wakil Bupati Humbang Hasundutan selama dua periode, yaitu 2005-2010 dan 2010-2015, mendampingi Bupati Maddin Sihombing. Dengan pengalaman sebelumnya dalam jabatannya, Dosmar Banjarnahor secara alami telah membangun popularitas di antara masyarakat. Karena itu, ketika dia mencalonkan diri kembali untuk periode kedua sebagai Bupati Humbang Hasundutan, popularitasnya telah menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan di kalangan warga.

Sosok petahana Dosmar Banjarnahor telah memiliki jaringan yang kuat dikalangan masyarakat, Sebelum terjun ke dunia politik Dosmar Banjarnahor sudah memiliki banyak pengalaman perkerjaan yang meningkatkan sisi popularitasnya antara lain menjadi Auditor di KAP Bambang Hadi Tresno, Akunting Keuangan di RS St. Borromeus, Finance & Tax di PT. Paesa Pasindo Engineering, Manager Keuangan di PT. Rama Abdi Pratama, serta Direktur Utama di PT. Damai Karya Persada.⁶

Jika dilihat dari prestasi yang telah diraih, Dosmar Banjarnahor dianugerahi penghargaan untuk kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan peringkat BB. Penghargaan tersebut diberikan dalam sebuah acara evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Wilayah I. Acara

⁶ <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/page/186> (Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan), Diakses Pada 06 November 2023 Pukul 20.11.

tersebut dihadiri oleh 11 Gubernur, 174 Bupati/Walikota, serta pejabat terkait dari Provinsi/Kabupaten/Kota Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Setelah menerima penghargaan, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor menyampaikan kepada media bahwa pencapaian tersebut sangat membanggakan dan telah meningkatkan citra Kabupaten Humbang Hasundutan di tingkat nasional. Bupati juga menyatakan bahwa penghargaan ini mencerminkan prestasi kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai satu-satunya entitas di Wilayah I yang berhasil meningkatkan peringkatnya dari CC menjadi BB, tanpa melalui peringkat B. Bupati menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan kekompakan seluruh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.⁷

Untuk mencapai dan menjaga kekuasaan, setiap calon berusaha memanfaatkan segala jenis sumberdaya yang ada, termasuk sumberdaya manusia dan material. Kekuatan politik hadir dalam masyarakat dengan tujuan mengamankan dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program berbasis pada suatu ideologi tertentu. Dalam konteks demokrasi, aktor politik menggunakan partisipasi dalam pemilihan umum atau pilkada sebagai cara untuk memperoleh dan menjaga kekuasaan. Oleh karena itu, menarik untuk mengevaluasi keberhasilan petahana dalam pilkada melalui kekuatan politik yang dimilikinya.

⁷ Waspada.id, https://www.waspada.id/sumut/bupati-humbahas-paparkan-prestasi-tahun-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bupati-humbahas-paparkan-prestasi-tahun-2021, Diakses Pada 12 November 2023 Pukul 22.00.

Menurut Asrinaldi, paling tidak terdapat tiga alasan penting dalam memahami kekuatan politik. *Pertama*, terkait dengan perubahan politik yang signifikan selama masa Orde Reformasi. *Kedua*, terkait dengan dinamika kekuatan politik yang menghadapi persaingan yang ketat dalam mempengaruhi kebijakan publik. *Ketiga*, berhubungan dengan konsolidasi demokrasi sebagai tahap berikutnya dari proses transisi demokrasi. Realisasi konsolidasi demokrasi dipercayai melibatkan serangkaian negosiasi antara kekuatan politik yang ada hingga mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama. Proses negosiasi tersebut mencerminkan adanya dinamika politik. Kehadiran negosiasi tersebut mencerminkan bahwa kekuatan politik telah melaksanakan peran dan fungsi sesuai dengan yang seharusnya.⁸

Penelitian ini difokuskan pada pasangan calon petahana Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nababan, dikarenakan mereka berhasil memenangkan kembali Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020. Pasangan ini berhasil meraih kemenangan di 7 wilayah kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Keberhasilan ini diduga erat kaitannya dengan potensi dukungan politik yang signifikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis aspek-aspek kekuatan politik yang berkontribusi pada kemenangan pasangan calon petahana tersebut.

Terdapat beberapa referensi penulis yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ayub Liwang tentang "Kekuatan dan Strategi Politik dalam Pilkada (Analisis Kemenangan Adnan

⁸ Asrinaldi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2014), hlm. 10-14.

Purihcta dalam Pilkada)." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendapatkan data deskriptif dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa dampak kuat politik yang dimiliki oleh Andan Puihcta sangat signifikan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Gowa. Penggunaan birokrasi, partai politik, kelompok politik, dan media sebagai sarana untuk menjalani proses pilkada menjadi aspek yang krusial. Selain peran kuat politik, strategi yang efektif dalam meraih kemenangan pilkada juga menjadi fokus utama. Salah satu strategi politik yang diterapkan adalah memilih konsultan politik, serta merancang strategi kampanye politik. Adnan Purihcta berhasil membuktikan keberhasilan dari pemanfaatan kekuatan politik dan strategi politiknya dalam pilkada Gowa yang lalu, terbukti dengan meraih kemenangan dengan persentase suara sebesar 41,65%.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Sektiono dengan judul "Kekuatan Politik Dan Kemenangan Petahana Dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kekuatan politik terhadap keberhasilan petahana beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan merujuk pada data dari wawancara serta dokumentasi, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti media massa, media sosial, birokrasi, organisasi masyarakat, dan modal ekonomi memiliki peran yang signifikan. Adanya

⁹ Muhammad Ayub Liwang (Skripsi), "*Kekuatan Dan Strategi Politik dalam Pilkada (Analisis Terhadap kemenangan Adnan Purihcta dalam Pilkada)*", (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

hubungan kekuasaan seperti klientalisme, patronase, dan brokerisme antara kekuatan politik dan petahana juga diamati. Terdapat tiga elemen yang memengaruhi kesuksesan petahana, yaitu politisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai dampak dari pandemi COVID-19, faktor internal petahana yang melibatkan rekam jejak dan kekuatan politik yang dimilikinya, serta faktor eksternal seperti kurangnya keterhubungan antara lawan dengan masyarakat dan kurangnya dukungan dari partai. Kesimpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tinggi petahana disebabkan oleh kekuatan politik yang kuat, sementara dukungan terhadap penantang terbatas karena petahana berhasil menggalang dukungan dengan efektif melalui modalitas yang dimilikinya.¹⁰

3. Penelitian oleh Roy Natsir tentang "Kekuatan Politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan serta mengevaluasi keberhasilan politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan utama yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang keberhasilan politik keduanya dalam pemilihan Walikota Makassar. Sumber data tambahan meliputi referensi dari berbagai jenis, seperti buku, artikel koran, materi internet, dan lain sebagainya. Temuan dari penelitian ini menyoroti beberapa faktor

¹⁰ Tri Sektiono (Skripsi), "*Kekuatan Politik Dan Kemenangan Petahana Dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020*", (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2023).

pendukung keberhasilan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, termasuk peran aktor politik, dukungan partai politik, keterlibatan birokrasi, dan eksposur positif dari media massa.¹¹

Dari tiga penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan ketiga penelitian tersebut sama-sama ingin menganalisis tentang kekuatan-kekuatan politik yang digunakan para calon dalam memenangkan sebuah pemilihan.

Perbedaan yang signifikan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan tiga penelitian terdahulu diatas terletak pada fokus subjek penelitian. Peneliti saat ini fokus meneliti terhadap calon tunggal, yakni melawan kotak kosong, sementara tiga penelitian sebelumnya berfokus pada penelitian yang melibatkan lawan atau pasangan lain sebagai objek utama dari analisis mereka.

Situasi ini menjadi menarik karena terkait dengan keberadaan pelaku politik dan merupakan salah satu aspek krusial dalam dinamika politik. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kekuatan calon tunggal dan demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Humbang Hasundutan. Hal ini memberikan landasan yang solid bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“KEMENANGAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan)”***.

¹¹ Roy Natsir (Skripsi), *“Kekuatan Politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013”*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan mengenai kemenangan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020, maka pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menjadi kekuatan calon tunggal dalam memenangkan Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020?
2. Apakah dengan hadirnya calon tunggal pada Pilkada Humbang Hasundutan, Pilkada tersebut masih demokratis?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi kekuatan calon tunggal dalam memenangkan Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis apakah dengan hadirnya tunggal pada Pilkada Humbang Hasundutan, Pilkada tersebut masih demokratis.

2.7 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada pembaca dengan tujuan memperluas pengetahuan dan informasi terkait Kemenangan Calon Tunggal pada Pilkada Humbang Hasundutan.

Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan pengetahuan penulis tentang kemenangan calon tunggal pada Pilkada. Dengan demikian dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik di Indonesia khususnya kabupaten Humbang Hasundutan.

1.5 LANDASAN TEORI

Teori merupakan suatu instrumen atau kerangka analisis yang dipakai untuk menyelidiki isu-isu yang dijelaskan dalam kerangka penelitian, sementara landasan teoritis digunakan dalam penelitian baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Beberapa unsur utama yang menjadi dasar teoritis dan konsep penulisan meliputi:

1. Konsep Kekuatan Politik

Dinamika politik di Indonesia dapat diamati melalui perkembangan dan pertumbuhan kekuatan politik dalam struktur politik. Pada kenyataannya, kekuatan politik bertransformasi menjadi beragam bentuk, seperti partai politik, kelompok kepentingan, organisasi profesi, birokrasi, militer, sektor swasta, serta organisasi kepemudaan/mahasiswa.¹²

Secara ringkas, daya pengaruh politik dapat diartikan sebagai entitas formal atau informal yang memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sambil menetapkan model keputusan politik sesuai

¹² Asrinaldi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2014), hlm. 27.

dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, daya pengaruh politik selalu cenderung terlibat dalam ranah politik di dalam kerangka sistem politik.¹³

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan politik adalah:

”masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan, dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik, orang-orang tersebut terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.”

Menurut pendapat Bachtiar Effendy, ada berbagai aspek berpotensi yang dapat diubah menjadi kekuatan politik, seperti:

“kekuatan tersebut bersifat formal atau nonformal. Kekuatan-kekuatan ataupun kelompok-kelompok yang sejenis dengan itu, kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk ke dalam partai-partai politik. Sementara yang di artikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal yaitu bagian dari bangunan civil society.”¹⁴

Di Indonesia, terutama pada periode reformasi, peran kekuatan politik muncul dan beroperasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Perkembangan karakter kekuatan politik dipengaruhi oleh interaksi di antara mereka, dan dalam banyak aspek, juga dipengaruhi oleh persaingan yang terjadi. Oleh karena itu, menurut Farchan Bukin (sebagaimana dikutip dalam Asrinaldi), penting untuk meletakkan kembali struktur politik dalam konteks model teori sistem dan eksistensi kekuatan politik. Hal ini dapat dicapai dengan memahami bentuk, peran, dan fungsi kekuatan politik

¹³ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁴ P. Anthonius Sitepu, *Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia*. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol. 3 No. 3. Sept 2004. Hlm. 164.

kontemporer dalam sistem politik. Kekuatan politik kontemporer dapat muncul dalam berbagai bentuk yang umum dikenal dalam kehidupan masyarakat modern, seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, militer, pemuda dan mahasiswa, organisasi buruh, dan sebagainya. Kekuatan politik tersebut dapat berperan secara independen tanpa harus melibatkan kekuatan politik lain. Namun, di sisi lain, kekuatan politik juga dapat bekerja sama dengan kekuatan politik lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Kerjasama ini seringkali terjadi karena adanya agenda publik yang perlu mereka perjuangkan.¹⁵

Kekuatan politik mencerminkan upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai atau menjaga tujuan mereka, bisa berupa upaya konservatif maupun progresif yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme. Teori kekuatan politik menjadi kerangka yang mendukung eksplorasi lebih mendalam tentang pasangan calon tunggal Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan. Peta politik secara umum menggambarkan kerangka hubungan sosial dan politik yang ada di suatu daerah. Ketika kita berbicara tentang peta politik, ini mencakup pemahaman tentang wilayah, lanskap, serta situasi dan kondisi politik yang berlaku di wilayah tempat politik aktif.¹⁶

¹⁵ Asrinaldi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2014), hlm. 177-178.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. (Jakarta. Balai Pustaka.1991).

2. Kelompok Ekonomi Sebagai Kekuatan Politik

Perbincangan mengenai dukungan finansial dari kelompok-kelompok tertentu, yang kerap disebut sebagai penyokong politik, pemodal, atau pendukung politik, tengah menjadi topik perbincangan dalam dunia politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang eksklusif hanya terjadi di Indonesia, namun, seperti yang diungkapkan oleh Assyaukanie, transaksi keuangan semacam ini umumnya terjadi di berbagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan berbagai negara lainnya. Partisipasi pengusaha dalam proses pemilihan umum kerap disebut sebagai "donokrasi," sebuah istilah yang mengacu pada keterkaitan intens antara penyandang dana kampanye (pemberi donasi) dan kandidat kepala daerah yang bersaing dalam pertarungan pemilihan kepala daerah.

Yahya Muhaimin menjelaskan bahwa pelaku usaha sering kali disebut sebagai "Pengusaha Klien," yang beroperasi dengan dukungan serta perlindungan dari lingkaran kekuasaan pemerintah. Komunitas pengusaha tersebut sangat bergantung pada dukungan dan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam hal konsesi dan monopoli. Umumnya, mereka berasal dari luar struktur birokrasi dan sering memiliki keterkaitan dengan keluarga elit yang sedang menguasai kekuasaan.¹⁷

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak secara langsung memerlukan kandidat untuk memiliki kekayaan ekonomi yang signifikan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 22-23.

Perusahaan tidak mampu berjalan secara independen karena bergantung pada faktor-faktor seperti konsumen, pemasok, dan regulasi pemerintah. Di sisi lain, politikus memerlukan dukungan pebisnis untuk kegiatan politik dan pendanaan partai politik mereka. Sumbangan dari pebisnis kaya raya diperlukan, terutama saat menghadapi pemilu, pilpres, dan pilkada.

Dalam konteks pengusaha sebagai kekuatan politik, mereka memiliki bahan finansial, jaringan politik, dan akses ke sumber daya alam. Mereka merupakan hasil gabungan dana, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Hubungan yang signifikan antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah mendorong mereka untuk aktif dalam merancang kebijakan dan melaksanakan inisiatif bisnis. Hal ini menggarisbawahi bahwa pelaku bisnis dan dunia politik senantiasa memiliki keterkaitan yang erat.¹⁸

Hubungan yang erat antara perekonomian yang terfokus dan keterkaitan politik-bisnis lebih erat sering melibatkan dukungan keuangan terhadap kampanye politik. Di daerah di mana kekayaan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor dan pelaku, kepemimpinan politik cenderung dikuasai oleh sekelompok kecil elit. Sementara itu, di wilayah-wilayah dengan distribusi ekonomi yang lebih merata, para calon memiliki akses ke sumber pendanaan yang lebih beragam untuk menjalin hubungan dengan pemilih secara bervariasi.

Dalam konteks ekonomi yang mengandalkan negara yang memiliki sedikit sektor industri, mendapatkan dukungan keuangan tanpa adanya motif

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23-24.

keuntungan pribadi dapat menjadi suatu tantangan yang sulit. Sektor utama dalam aktivitas ekonomi terkait dengan alokasi anggaran atau persetujuan pemerintah, seperti dalam bidang konstruksi, pertanian, pertambangan, dan industri restoran. Para pengusaha lokal cenderung memanfaatkan kontribusi kampanye kepada berbagai kandidat untuk kepentingan ekonomi pribadi mereka, tanpa fokus pada perkuatan prosedur hukum atau tender yang transparan. Para pelaku bisnis umumnya berupaya untuk menghindari keterlibatan pribadi yang intensif dengan satu calon, mereka lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada semua kandidat agar tetap meraih manfaat tanpa memandang hasil akhir pemilihan.

3. Klientelisme Elektoral

Dalam studi-studi komparatif tentang klientelisme elektoral, perdebatan tentang faktor-faktor penentu pembelian suara di tingkat individu biasanya mengambil fokus pada isu seputar pemilihan target pemilih. Anggota politisi terbatas, tetapi pada saat yang sama mereka ingin membelanjakan sumber daya secara efisien kepada pemilih yang paling responsif (yakni pemilih yang kemungkinan besar akan memberikan suara kepada pemberi sebagai respons atas uang yang mereka terima). Terlebih lagi, sistem pemilu yang rahasia (*secret voting*) menyulitkan kandidat dan tim sukses melakukan verifikasi secara memadai mengenai kemungkinan penerima memilih calon yang memberikan uang atau tidak. Untuk itu, penting bagi mesin politik untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak hanya

bisa dipengaruhi oleh politik uang, tetapi juga paling dapat diandalkan dalam memberikan suaranya kepada si pemberi.¹⁹

Sacara umum, literatur klientelisme elektoral telah mengidentifikasi tiga faktor yang menyebabkan seorang individu lebih potensial menjadi target pembelian suara ketimbang yang lain. Ketiga hal tersebut adalah faktor sosial-ekonomi dan demografi, tingkat keterlibatan kewargaan atau sosial (*civic engagement*), sikap politik warga (*political attitudes*). Model pertama berfokus pada pandangan kuasideterministik klientelisme elektoral yang selaras dengan argumen yang dibuat oleh para teoritikus modernisasi. Menurut kubu ini, klientelisme paling bisa dijelaskan dalam konteks relasi sosial-politik pramodern, terutama yang melibatkan warga kelas bawah.²⁰ Dengan demikian, klientelisme adalah elemen intrinsik politik “dunia ketiga” yang banyak mendera negara-negara yang relatif miskin dan memiliki tingkat literasi yang rendah. Mereka tidak “modern”.²¹

Masih dalam paradigma modernisasi ini, beberapa ahli juga berpendapat bahwa variasi dalam pola operasi politik uang dapat disebabkan dari perbedaan tempat tinggal. Hicken berpendapat bahwa politik uang sulit terjadi di daerah perkotaan, sebagian karena melemahnya peran jaringan patron-klien tradisional yang memungkinkan calon dalam mendistribusikan imbalan materiel kepada pemilih. Selain itu, orang-orang tinggal di daerah

¹⁹ Burhanuddin, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020.

²⁰ Lipset, SM, 1959, “*Some Social Requisites Of Democracy: Economic Development And Political Legitimacy*”. *The American Political Science Review*, Vol. 53(1): 69-105.

²¹ Andrews, JT dan K, Inman. 2009. “*Explaining Vote Choise In Africa’s Emerging Democracies*”, Makalah Pada Midwest Political Science Assosiation.

perdesaan cenderung terpapar politik uang karena tingkat pendapatan dan pendidikan lebih tinggi di daerah perkotaan. Karena lebih sejahtera, tuntutan warga kota terhadap klientekisme atau barang privat tidak sebesar warga pedesaan. Mereka cenderung menaruh perhatian pada barang publik (*public goods*) dan lebih peduli terhadap masalah-masalah seperti kemacetan lalu lintas, transportasi umum, dan penanganan sampah.²²

Fokus kajian yang memakai pendekatan modernisasi ekonomi adalah pada konseptualisasi argumen dan studi kasus yang mendukungnya. Berdasarkan studi-studi ini, “Klientelisme cenderung akan menghilang ketika negara-negara mengalami modernisasi, baik secara ekonomi, maupun secara demokratis”, karena itu, pembelian suara tampaknya lebih bersifat endemik di banyak negara berkembang-dan hampir secara eksklusif hanya terbatas pada negara-negara itu.²³

Aliran akademis kedua yang menjelaskan pemilih yang sering menjadi target sasaran pembelian suara menitikberatkan pada keterlibatan kewargaan (sosial). Dalam logika mazhab ini, distribusi logistik politik uang akan menyulitkan jika dilakukan secara retail. Karena itu dengan tujuan memudahkan pertukaran klientelistik, banyak politisi memanfaatkan organisasi informal dan formal yang memiliki jumlah anggota atau massa besar.

Kubu kesarjanaan ketiga menekankan hubungan erat antara klientelisme elektoral dan political attitudes (sikap politik) dalam

²² Hicken, 2011. “Clientelism”, *Annual Review Political Science*.

²³ *Ibid.*

menjelaskan sasaran politik uang.²⁴ Secara umum, sikap politik mencakup komponen-komponen seperti identifikasi pemilih terhadap partai (party ID), efikasi, minat politik (political interest), informasi politik, kepercayaan terhadap lembaga politik. (political trust), partisipasi politik, dan dukungan terhadap demokrasi.²⁵ Terkait party ID, para ahli belum menawarkan kesimpulan yang pasti: Komponen political attitude ini bisa memprediksi kemungkinan seseorang terpapar politik uang atau tidak.

Dimensi sikap politik berikutnya yang mungkin relevan dengan klientelisme elektoral adalah efikasi politik, yakni perasaan psiko-logis bahwa seorang warga negara mampu memengaruhi keputusan pemerintah, meyakini bahwa pemerintah peduli dengan apa yang dipikirkan rakyat, dan percaya bahwa pemerintah akan merespons tuntutan mereka. Variabel sikap politik yang terakhir yang mungkin terkait dengan klientelisme elektoral adalah dukungan terhadap demokrasi. Pandangan yang populer di kalangan para sarjana adalah bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

berpendapat bahwa praktik jual beli suara pada dasarnya tidak demokratis karena melibatkan "akuntabilitas terbalik". Alih-alih politisi bertanggung jawab kepada pemilih, kata Stokes lebih lanjut, di saat politik uang terjadi, pemilihlah yang justru diminta pertanggungjawaban atas pilihan karena suara mereka telah dibeli. Karena itu, dapat disimpulkan

²⁴ Manzetti, L. dan C. Wilson, C. 2009. "Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?" Dalam C. Blake dan S. Morris (ed.). *Corruption and Democracy in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

²⁵ Verba, S. dan N. Ni. 1972. *Participation in America*. New York: Harper and Row.

bahwa pemilih yang mendukung demokrasi diperkirakan kecil kemungkinannya terlibat dalam politik uang dan demikian pula sebaliknya.²⁶ Singkatnya, ada tiga kerangka konseptual yang dipercaya dapat memengaruhi tingkat politik uang: faktor sosial-ekonomi atau modernisasi, keterlibatan dalam organisasi sosial, dan sikap politik warga.

4. Politisasi Birokrasi

Dalam konteks politik di Indonesia, sejak era pra-kemerdekaan hingga Orde Baru, birokrasi sering digunakan sebagai alat politik oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kondisi ini menciptakan institusi patron-klien di mana penguasa (patron) menuntut loyalitas dari birokrasi bawahannya dengan memberikan hadiah atau hak istimewa kepada mereka (klien). Mentalitas ini tercermin dalam model birokrasi di Indonesia, yang seringkali menjadi perpanjangan tangan penguasa, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Birokrasi pada dasarnya merupakan “a political creation” dan tidak lepas dari masalah politik. Hal ini tidak lepas dari struktur birokrasi yang diperuntukkan sebagai pelayanan publik. Disini, birokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan “who gets what” dari sektor publik yang ada. Menurut Herbert Kaufman²⁷, loyalitas birokrasi tidak berlandaskan pada hubungan politik, melainkan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Miftah Thoha menyampaikan argumen serupa, yaitu bahwa netralitas birokrasi pada dasarnya adalah sebuah sistem di mana

²⁶ Stokes (ed.). *The Oxford Handbook of Comparative Politics* New York: Oxford University Press.

²⁷ Herbert Kaufman, “Teori Politik Modern”, Raja Grafindo, Jakarta, (2001), hlm. 220.

birokrasi tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah yang berkuasa, terlepas dari perubahan partai politik yang memerintah.²⁸

Dalam teori principal-agent, politisi, baik yang berada di eksekutif maupun parlemen, berperan sebagai principal atau master. Sementara itu, birokrasi berperan sebagai agent. Oleh karena itu, birokrasi memiliki peran penting untuk melaksanakan apa yang diinginkan dan dirumuskan oleh para politisi. Secara administratif, anggota birokrasi bertanggung jawab kepada politisi yang mengangkat dan mempromosikan mereka.

Secara politik, politisi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka. Berbagai kasus menunjukkan bahwa birokrasi seringkali lebih melayani dirinya sendiri dan kepentingan kliennya daripada mendahulukan kepentingan umum. Tidak jarang, birokrasi juga menjadi alat politik dari kekuatan politik tertentu. Hal ini tentu tidak seharusnya terjadi. Karena penjelasan ilmiah mengenai birokrasi harus mencakup usaha untuk menguji hubungan administratif dan aparatur manajerial dalam konteks sosial yang spesifik di mana birokrasi tersebut dibentuk.

Perkembangan politisasi birokrasi di pemerintahan daerah saat ini cukup pesat, terutama dengan diberlakukannya sistem desentralisasi dan demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA). Sudah menjadi rahasia umum bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya bersikap netral dalam demokrasi langsung, kini sering terlibat dalam persaingan untuk mendukung salah satu kandidat yang berpartisipasi

²⁸ Meier dan O'Toole, "*Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*", Prenadamedia Group, Jakarta, (2010). Halaman 222.

dalam PILKADA. Kompetensi yang diperlihatkan bukan lagi berdasarkan kapasitas dan kinerja, tetapi lebih kepada upaya mendekati dan mendukung kandidat, dengan harapan mendapatkan posisi strategis yang mungkin tidak sesuai dengan latar belakang mereka.

Selanjutnya, alasan ASN memberikan dukungan adalah karena mereka sering menjadi korban dari sistem demokrasi langsung. Misalnya, sebelum PILKADA, ASN mungkin memiliki jabatan tertentu, namun setelah PILKADA, mereka dapat dipindahkan ke posisi yang lebih rendah, atau bahkan tidak memiliki jabatan sama sekali dan dipindahkan ke posisi yang tidak jelas tanpa penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang spesifik.²⁹

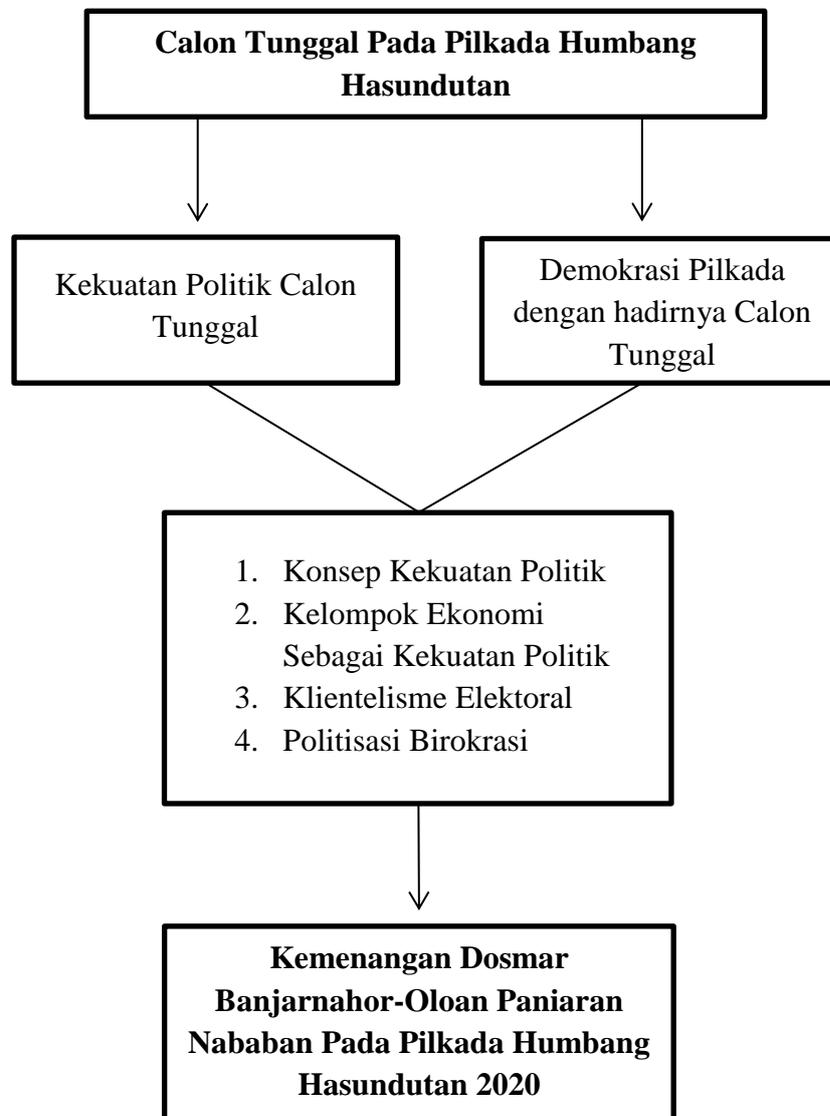
Hal ini memaksa ASN, sebagai birokrat, untuk memilih di antara dua pilihan sulit yang bertentangan dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai birokrat, yaitu memberikan pelayanan publik kepada semua pihak. Fenomena ini menyebabkan ketidaknyamanan birokrat dalam meniti karir secara bertahap berdasarkan komitmen dan kapasitas yang dimiliki. Sistem demokrasi langsung saat ini berdampak merusak tatanan yang mengabaikan peraturan tentang mutasi jabatan ASN berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh organisasi atau SKPD.³⁰

²⁹ Yunus, (Skripsi), *Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara)*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2017, Hlm 17.

³⁰ *Ibid.*

1.6 KERANGKA BERFIKIR

kerangka berfikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Untuk menganalisis isu yang menjadi fokus penelitian ini yaitu calon tunggal, peneliti memanfaatkan Konsep Kekuatan Politik, Kelompok Ekonomi Sebagai Kekuatan Politik, Klientelisme Elektoral, dan Politisasi Birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian bertujuan mengenali kekuatan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Humbang Hasundutan

Tahun 2020, serta dapat menganalisis demokrasi dalam Pilkada akibat hadirnya calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020.

1.7 METODE PENELITIAN

1.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang mengelola dan menjelaskan data serta informasi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Pendekatan penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup proses analisis. Pengungkapan data dan informasi diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti.

Keputusan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam mengkaji Kemenangan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Humbang Hasundutan tahun 2020 didasarkan pada pertimbangan fakta, hambatan, kendala, dan hasil penelitian. Pendekatan ini dipilih agar analisis lebih mudah dilakukan melalui gambaran yang mendalam, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang akurat mengenai kemenangan calon tunggal dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Humbang Hasundutan tahun 2020.

1.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

1.1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua titik, yang pertama yaitu analisis kekuatan politik yang memengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah Humbang Hasundutan Tahun 2020. Kemudian demokrasi pada pilkada Pilkada Humbang Hasundutan dengan hadirnya calon tunggal.

1.1.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan informasi yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian. Sumber-sumber data yang digunakan mencakup:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama dalam rangka penelitian ini. Untuk mengonfirmasi fakta di lapangan, peneliti memerlukan data yang diperoleh melalui kegiatan lapangan atau daerah penelitian, melibatkan wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung. Peneliti secara langsung berinteraksi dengan informan yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, termasuk hasil wawancara yang direkam dan dokumentasi visual kegiatan di lapangan. Proses wawancara dengan berbagai sumber menghasilkan informasi, seperti data mengenai peta kekuatan politik calon tunggal pada Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung dalam penelitian ini. Selama tahap telaah pustaka, peneliti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber penelitian sebelumnya, seperti buku, jurnal, dan sumber informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

1.1.5. Teknik Penentuan Informasi

Metode penentuan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan data yang mempertimbangkan keahlian informan dalam konteks yang akan diteliti. Peneliti menentukan informan berdasarkan keterlibatan mereka dengan objek penelitian, dengan demikian memilih individu yang memiliki pengalaman langsung atau berpartisipasi dalam Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020. Adapun informan yang telah ditentukan peneliti adalah sebagai berikut:

No.	lembaga	Jumlah	Alasan
1.	Ketua Partai DPC PDIP	Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H.	Merupakan partai yang mengusung paslon Bupati dan meraih 7 kursi di DPRD.
2.	Anggota DPRD Humbang Hasundutan	Manaek Hutasoit, A.Md.	Mengetahui pengaruh kekuatan politik

	(Partai Golkar).		terhadap petahana dan paham akan demokrasi lokal.
3.	Tim Pemenangan Dosmar-Oloan.	Ganda Silaban	Mengetahui pengaruh kekuatan politik terhadap petahana dan paham akan demokrasi lokal.
4.	Ketua Kotak Kosong	Parulian Simamora.	Mengetahui pengaruh kekuatan politik terhadap petahana dan paham akan demokrasi lokal.
5.	Pengamat Politik	Deka Seply Silaban, S.T.	Merupakan aktivis Humbang Hasundutan yang mengetahui dinamika politik yang terjadi di Humbang Hasundutan
6.	Masyarakat Humbang Hasundutan	Torus Silaban	mengetahui dinamika politik yang terjadi di Humbang Hasundutan
7.	Masyarakat Humbang	Benget Silaban	mengetahui dinamika

	Hasundutan		politik yang terjadi di Humbang Hasundutan
--	------------	--	---

1.1.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses wawancara dapat dijelaskan sebagai pertemuan antara peneliti dan responden, di mana respon dari responden dianggap sebagai data mentah. Kegiatan wawancara ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa wawancara merupakan aspek krusial dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung dari berbagai informan.

b. Pemanfaatan Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, atau referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

1.1.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Ketika melakukan wawancara, peneliti telah menganalisis respons dari responden. Jika respons tersebut dianggap belum memuaskan setelah dianalisis, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lebih lanjut hingga

mencapai tahap tertentu untuk mendapatkan data yang dianggap kredibel. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlanjut secara kontiniu hingga selesai, sehingga data sudah mencapai kejenuhan.³¹

Teknik analisis data yang dipraktikkan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan analisis data induktif. Pendekatan ini mencakup penarikan kesimpulan yang berasal dari informasi khusus, untuk selanjutnya diaplikasikan secara umum. Langkah-langkah yang digunakan dalam proses analisis data penelitian mencakup hal-hal berikut:³²

a. Pengumpulan Data

Aktivitas utama dalam setiap penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data melibatkan pencarian, pencatatan, dan pengumpulan semua informasi dengan cara yang obyektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Ini melibatkan perekaman informasi dan berbagai jenis data yang ada di lapangan.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dapat berjumlah besar, oleh karena itu penting untuk mencatat dengan teliti dan rinci. Melakukan reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang esensial, memusatkan perhatian pada aspek yang signifikan, menemukan tema dan pola, serta menghilangkan informasi yang tidak relevan. Dengan cara ini, data yang telah disederhanakan akan memberikan gambaran yang lebih terperinci,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm 321.

³² *Ibid*, hlm. 322-325.

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mendapatkannya kembali jika diperlukan.

c. Penyajian Data

Proses penyajian data dilakukan untuk memungkinkan pemahaman gambaran umum atau aspek-aspek tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan informasi sesuai dengan inti permasalahan yang dimulai dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

Kegiatan analisis terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dari proses analisis data. Langkah ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Menarik kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang awalnya ambigu akan berkembang menjadi lebih jelas dan terperinci.

1.1.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Uji keabsahan data melibatkan penilaian kredibilitas data, yang terdiri dari uji validitas internal. Uji kredibilitas dilaksanakan melalui perluasan pengamatan, peningkatan ketelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, memberikan umpan balik, dan analisis kasus negatif. Triangulasi

data merupakan metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain. Selain itu, triangulasi dapat digunakan sebagai langkah pemeriksaan atau pembandingan terhadap data. Salah satu teknik triangulasi yang umum digunakan adalah memeriksa data dari sumber yang berbeda. Data valid yang terkumpul dalam penelitian kemudian dianalisis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Keabsahan data diperlukan untuk mencegah kesalahan atau kelalaian dalam data yang terkumpul, sehingga peneliti perlu melakukan pengecekan keabsahan data. Dengan memanfaatkan triangulasi, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan ini dengan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa informasi dari berbagai sumber, dan menggunakan metode beragam untuk memastikan kepercayaan data.³³

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdaka, 2016), hlm.330.